

## **PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN C DI KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA**

### **MANAGEMENT OF “PAKET B AND C” EQUALITY EDUCATION PROGRAM IN SUBDISTRICT OF WIROBRAJAN YOGYAKARTA CITY**

Oleh: Putri Syafrida R., Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta  
putrisyafridariyana@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan program pendidikan kesetaraan paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo, satu-satunya PKBM aktif di Kecamatan Wirobrajan, mencakup: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; dan (3) evaluasi. Penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah: (1) Perencanaan, meliputi; (a) Penerimaan warga belajar terbuka (b) Perekrutan tutor tertutup; (c) Penggunaan kurikulum KTSP; (d) Sarana prasarana menyangkut modul dan tempat pembelajaran; (e) Pembiayaan dari donatur, iuran warga belajar, dan kas lembaga. (2) Pelaksanaan, meliputi; (a) kebutuhan warga belajar terpenuhi, kedisiplinan belum optimal; (b) tutor memenuhi kualifikasi dan menjalankan tupoksinya; (c) pengelola memenuhi kualifikasi, pembagian tupoksi belum optimal; (d) pemanfaatan sarana prasarana di dalam kelas; (e) acuan materi tidak selalu pada RPP/silabus; (f) alokasi dana untuk kegiatan operasional. (3) Evaluasi, meliputi; (a) Evaluasi Hasil Belajar yaitu UH, UTS, UAS, UKK, dan UNPK. (b) Evaluasi program dilakukan dengan pihak Pembina, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Evaluasi Internal lembaga.

Kata kunci: pengelolaan, pendidikan kesetaraan, paket B dan C

#### **Abstract**

*This study aims to describe the management of equality programmes which are “Paket B and C” at PKBM Rangsang Imo Joyo that’s the only active PKBM in Wirobrajan Subdistrict, includes: (1) planning, (2) actuating, (3) evaluating. This study is descriptive qualitative approach. The results are: (1) planning, includes; (a) acceptance of students openly; (b) recruitment of tutor closely; (c) using curriculum of KTSP 2006; (d) facilities concern to books and learning place; (e) funding of donord, levy of student, and institute treasury, (2) actuating includes; (a) the needs of students were overwhelmed/completed, the disciplining wasn’t optimal; (b) the tutors got the qualifications and walk away like their duties; (c) the manager has been the qualifications, the division of the duties and the actuating weren’t optimal; (d) the ufilization of fasilities were majority in class; (e) the refferences learning of materials weren’t always on syllabus; (f) fund allocation was to operational needs,(3) evaluating includes; (a) the evaluation of results the sudy, that are the daily test, the mid test, the final test, the vocational competence test, and national test for equality education, (b) programme evaluations are applied by builder, educational departement of Yogyakarta City, and internal evaluation of the institute.*

*Keywords: management, equality education, “Paket B and C”*

#### **PENDAHULUAN**

Dengan dicanangkannya wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah maka segala segi pendidikan wajib mengembangkan diri untuk memperbesar kesempatan belajar. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”.

Fokus penelitian ini ada pada pendidikan nonformal yang mana pendidikan nonformal juga ikut serta membantu masyarakat luas dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dengan prinsipnya yaitu pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam UU 20 Tahun 2003 maka “pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan”.

Program yang diangkat dalam penelitian ini adalah program kesetaraan kejar paket. Program kesetaraan merupakan program pendidikan nasional yang bermaksud pemeratakan kesempatan belajar bagi pihak yang belum memperoleh pendidikan seperti pada umumnya.

Suatu paparan menarik bahwa Kota Yogyakarta yang terkenal sebagai pusat Provinsi DIY sekaligus julukan kota pelajar menjadi urutan ketiga dalam angka putus sekolah se-DIY berdasar Badan Pusat Statistik per tahun 2012, maka penelitian ini mengambil lokasi di PKBM Rangsang Imojoyo, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. PKBM Rangsang Imo Joyo adalah satu-satunya PKBM yang masih aktif di kecamatan Wirobrajan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan terhadap program kesetaraan saja sebab hal tersebut memiliki banyak aspek yang mempengaruhi pengelolaan PKBM secara umum.

Tujuan penelitian ini adalah memaparkan pengelolaan program pendidikan kesetaraan yang akan dilihat melalui 3 tahap manajemen yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi.

Komponen yang diteliti melalui komponen tersebut adalah Pengelolaan Peserta didik (Warga Belajar), Kurikulum, Personalia (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Sarana Prasarana, dan Keuangan. Data yang diambil berkaitan dengan program kesetaraan paket B dan C di PKBM Rangsang Imojoyo, Wirobrajan Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian akan dijelaskan secara deskriptif dengan menggambarkan paparan pengelolaan Program Kesetaraan Paket B dan C di PKBM Rangsang Imojoyo. Data yang dicari meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program kesetaraan yang dijelaskan melalui kata-kata dengan analisis dengan prinsip logika.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Rangsang Imojoyo, yang terletak di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Waktu pelaksanaan adalah pada bulan Desember 2015 sampai dengan April 2016. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap: penyusunan proposal, perizinan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

### **Target/Subyek Penelitian**

Subyek Penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pengelola Paket B dan C dengan Ketua PKBM sebagai informan kunci dan

data di cross check pada informan pendukung seperti perwakilan tutor, warga belajar, dan pembina lembaga.

### **Prosedur**

Prosedur diawali dengan observasi awal pra penelitian, kemudian mengkaji paparan masalah dari hasil observasi awal dengan teori dan pedoman, menyusun instrumen penelitian, dilanjutkan pengumpulan data, lalu pengolahan data melalui beberapa teknik analisa data, membahas dengan mengkaitkan dengan teori maupun pedoman, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Teknik penelitian harus obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan harus mampu mengungkap tujuan penelitian dan menemukan hasil yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini ingin mendapatkan hasil berupa deskripsi data bagaimana pengelolaan Program Kesetaraan Paket B dan C di PKBM Rangsang Imojoyo. Pengelolaan program akan mencakup warga belajar, tutor, sarana prasarana, biaya, dan kurikulum yang ada dalam program tersebut.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Dokumentasi, Wawancara, dan Observasi.

Metode dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006: 231). Mengenai

pengertian tersebut, Tiur a. Siburian (2013: 72) menambahkan bahwa di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki badan-badan tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendapat identitas lembaga, legalitas lembaga, salinan ijazah pengelola dan tutor, sertifikat pengembangan pengelola dan tutor, proposal yang pernah dibuat PKBM, daftar hadir, RPP, Silabus, soal ujian, dan dokumen pendukung penelitian lainnya.

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden (Tiur a. Siburian, 2013: 64). Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan secara bebas terpimpin. Menurut S. Nasution (1996: 113) wawancara bebas terpimpin yaitu memberi pertanyaan sesuai dengan keinginan peneliti namun tetap berpedoman pada ketentuan yang menjadi pengontrol relevansi isi wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada subyek penelitian untuk mendapat data mayoritas, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan menyangkut masalah warga belajar, tutor, kurikulum, sarana prasarana, dan biaya pendidikan kesetaraan.

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis (Tiur a. Siburian, 2013: 63). Pendapat ini senada dengan pendatat Suharsimi Arikunto (2006: 128) yang mengatakan observasi sebagai kegiatan pengamatan, pencatatan, secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki. Maka dari itu, observasi tidak dilakukan secara

untung-untungan dan sesuka hati dalam usaha mendekati situasi. Akan tetapi semua pelaksanaan dilakukan secara sistematis dan berencana. Observasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung sarana belajar sekaligus kegiatan belajar mengajar dalam program kesetaraan Paket B dan C. Jenis observasi yang dipakai adalah pengamatan nonpartisipan yang berarti peneliti tidak terlibat secara langsung dalam tindakan personal atau interaksi sosial.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai alat atau instrumen itu sendiri berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2010: 306).

Walau demikian, berhubungan dengan instrumen, pendapat tersebut masih ditambah bahwa setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2010: 307).

Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, dan pedoman observasi. Jumlah pedoman wawancara adalah lima yaitu untuk Pembina PKBM, Pengelola PKBM, Tutor/Narasumber Teknis, Koordinator Program B dan C, dan untuk warga belajar program Kesetaraan. Pedoman Observasi digunakan untuk melihat kondisi sarana prasarana

dan proses belajar mengajar Program Kesetaraan. Pedoman dokumentasi dimaksudkan untuk melihat arsip lembaga yang menunjang pelaksanaan program kesetaraan seperti Silabus, RPP, Presensi, dan Soal Ujian.

### **Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data diuji melalui dua cara yaitu dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian maka diperoleh hasil dan pembahasan sebagai berikut:

### **(Perencanaan)**

#### **Penerimaan dan Seleksi Calon Warga Belajar**

Sistem penerimaan warga belajar baru di Pendidikan Kesetaraan PKBM Rangsang Imo Joyo bersifat terbuka dimana seluruh lapisan masyarakat yang sanggup (secara psikologis) menempuh pendidikan diperbolehkan mendaftar. Sebelum pendaftaran, pihak lembaga melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Bentuk sosialisasi tertulis dilakukan melalui penyebaran brosur, sedangkan secara lisan adalah melalui pertemuan, rapat, maupun dari warga ke warga. Penerimaan dilakukan satu tahun sekali tiap awal tahun ajaran baru namun calon warga belajar tidak harus memulai dari awal program Paket. Warga belajar bisa masuk di awal tingkatan kelas di satu Paket dan bukan harus di awal Paket, misalnya kelas VIII Paket B.

Syarat pendaftaran calon warga belajar di Paket B dan C PKBM Rangsang Imo Joyo adalah

ijazah terakhir, raport terakhir, foto, dan fotocopy KTP. Syarat ijazah dimaksudkan untuk melihat pendidikan terakhir yang sudah ditempuh calon warga belajar. Raport terakhir menunjukkan capaian tingkatan kelas yang telah ditempuh warga belajar dan syarat itu dapat digunakan pengelola untuk mengelompokkan rombongan belajar. Foto dan fotocopy KTP digunakan untuk melengkapi identitas warga belajar.

Sasaran pendidikan kesetaraan di PKBM ini tidak memprioritaskan calon warga belajar usia sekolah melainkan masyarakat umum segala usia dan segala latar belakang. Dalam aturan sebenarnya bukan berarti membatasi sasaran yang harus didahulukan, namun lebih kepada memberi fokus target yang akan direkrut dalam pendidikan kesetaraan di setiap tingkatan. PKBM Rangsang Imo Joyo bukan mengabaikan hal tersebut, namun mencoba bersifat terbuka karena pada kenyataannya, dengan tidak adanya prioritas sasaran pun, warga belajar yang mendaftar dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

### **Perekrutan dan Seleksi Calon Tutor dan Narasumber Teknis**

Ada empat poin dalam persyaratan tutor pendidikan kesetaraan Paket B dan C. Poin pertama adalah syarat kualifikasi yang sebaiknya dimiliki calon tutor yaitu pendidikan minimal S1 dengan prioritas latar belakang pendidikan keguruan atau berprofesi sebagai guru. Tutor di PKBM Rangsang Imo Joyo berjumlah empat belas orang. Tiga belas diantaranya memiliki pendidikan minimal S1 dan satu orang tutor dengan pendidikan terakhir, namun pihak yang bersangkutan sedang menyelesaikan tugas akhir

untuk mendapat gelar S1. Mengenai prioritas latar belakang pendidikan keguruan, PKBM Rangsang Imo Joyo memiliki kebijakan yang berbeda dalam menerima tutor baru. Dari empat belas tutor, sepuluh berasal dari latar belakang pendidikan keguruan dan empat lainnya termasuk berlatar belakang non-kependidikan. Pengelola mengaku bahwa benar adanya empat tutor yang berasal dari non-kependidikan namun ilmu yang dimiliki sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Hal ini bukan menjadi masalah karena pembelajaran di kelas untuk pendidikan nonformal tidak terpaku pada ilmu dasar kependidikan yang harus menguasai pengelolaan kelas secara teoritis. Menjadi pertimbangan di sini adalah pendidik (tutor) pendidikan kesetaraan haruslah memahami warga belajar dengan baik sehingga tahu bagaimana strategi untuk penyampaian materi kepadanya. Terlepas dari hal tersebut, kemauan dan keikhlasan tutor-tutor tersebut menjadi hal penting yang dijadikan pertimbangan pengelola menerima tutor. Lembaga ini tidak mengutamakan pencarian gaji namun lebih ke pengalaman dan pengaplikasian rasa sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Adanya perbedaan ini bukan menjadi pelanggaran lembaga sebab tertulis dalam peraturan bahwa diprioritaskan latar belakang pendidikan keguruan sehingga bukan menjadi keharusan bahwa tutor haruslah dari latar pendidikan keguruan. Bila kondisi membuat lembaga untuk mengambil keputusan diluar latar belakang keguruan, maka hal tersebut diperbolehkan.

Poin kedua dari peraturan di atas adalah seorang tutor harus menguasai substansi yang

diajarkan. Dari empat belas tutor di PKBM ini, semua sudah mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Satu tutor diantaranya mengampu dua mata pelajaran (rangkap) sehingga ada pergeseran substansi ajar. Tutor yang dimaksud adalah Ibu Subektingrum dengan mengajar Sosiologi dan Sejarah. Dua materi yang diajar oleh tutor tersebut memang berbeda namun masih dalam satu bidang. Rangkapnya substansi membuat tutor mengajar satu mata pelajaran di luar ilmu dasarnya. Hal ini dilakukan lembaga karena belum tersedianya tutor untuk mata pelajaran sejarah. Sosiologi dan sejarah memang memiliki kajian ilmu masing-masing namun masih dalam paduan ilmu IPS. Selama materi tersampaikan dan pihak terkait baik tutor dan warga belajar tidak merasa keberatan maka tindakan ini baik untuk dilakukan.

Poin ketiga membahas kemampuan dasar tutor mengenai pembelajaran partisipatif serta kemampuan mengelola proses pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran partisipatif menempatkan pendidik sebagai fasilitator. Menurut Sujarwo (2013: 27) pembelajaran partisipatif melibatkan warga belajar dalam proses membuat rencana, kegiatan pembelajaran, dan evaluasinya. Pendapat tersebut menitikberatkan pada kemampuan tutor atas pengelolaan pembelajaran dengan melibatkan warga belajar di setiap tahapannya. Di tahap rencana dan evaluasi, pengelola tidak dapat bertindak secara leluasa sebab ada ketentuan yang mengarahkan standar materi maupun kelulusan pada standar sekolah formal di jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun tutor

dapat merencanakan metode pembelajaran ke arah pendidikan orang dewasa. Aplikasi dalam pembelajaran sendiri melihat pada kemauan warga belajar. Hal ini mengenai kecepatan materi dan proses penyampaiannya.

Poin keempat menurut persyaratan di atas mengharuskan tutor mendidik warga belajar hingga akhir program. Hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PKBM Rangsang Imo Joyo karena posisi tutor pernah mengalami bongkar pasang dikarenakan ada tutor yang bukan dari domisili sekitar lembaga. Alasan lain karena kesibukan dan tutor tersebut adalah seorang fresh graduate yang mencari pengalaman. Secara garis besar tutor lembaga mendidik warga belajar mulai awal masuk hingga akhir program. Maka dari itu, perekrutan tutor dilakukan secara fleksibel dengan melihat formasi tutor itu sendiri. Perekrutan dilaksanakan saat ada kekosongan tutor.

Tenaga pendidik selain tutor adalah narasumber teknis, namun hal tersebut tidak dibahas sebab lembaga PKBM Rangsang Imo Joyo belum mengaplikasikan pelatihan keterampilan dengan narasumber teknis sebagai pendidik atau pelatihnya.

### **Penetapan Kurikulum**

Kurikulum pendidikan Kesetaraan di PKBM Rangsang Imo Joyo adalah KTSP. Selain karena saat pendirian lembaga kurikulum yang berlaku adalah KTSP, prinsip yang terkandung dalam KTSP sesuai dengan prinsip pendidikan kesetaraan.

Pendidikan kesetaraan termasuk Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo

mementingkan perkembangan potensi peserta didik dengan melihat lingkungan sekitarnya sehingga ilmu yang diperoleh relevan dengan kebutuhan hidup di masyarakat. Pendidikan kesetaraan jelas mendukung program pendidikan sepanjang hayat melalui usaha menarik masyarakat umum untuk mengikuti program paket agar memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang ras, suku, budaya, maupun usia.

### **Penetapan Tempat Pembelajaran**

Tempat untuk kegiatan Program Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo hanya meliputi tempat pembelajaran dan tidak menggunakan tempat pelatihan sebab di lembaga ini belum ada program pelatihan keterampilan bagi warga belajar. Tempat pembelajaran dan segala isinya masuk ke dalam jenis sarana prasarana (sarpras) yang mendukung pembelajaran pendidikan kesetaraan di PKBM Rangsang Imo Joyo. Sebelum tahun ajaran 2015/2016 tempat pembelajaran bergiliran antara aula kantor Kecamatan Wirobrajan atau ruang serba guna di kantor Kelurahan Patangpuluhan, tergantung ruangan yang sedang tidak terpakai. Dua ruangan tersebut belum berbentuk kelas sehingga pengelola melakukan perubahan tata ruang misal membutuhkan sarana pembelajaran lain seperti papan tulis dan sejenisnya.

Saat ini, tempat pembelajaran sudah pasti yaitu di SMK Pembangunan Yogyakarta. Tempat pembelajaran saat ini diperoleh secara pinjam-meminjam dengan pemilik secara kekeluargaan. Lokasi SMK tidak jauh dari Kantor Kelurahan dan Kecamatan sehingga jangkauan lokasi tidak

jauh berbeda dari lokasi sebelumnya. Warga belajar dan tutor yang berdomisili di sekitar Kecamatan Wirobrajan tidak kesulitan mencapai lokasi yang baru. Mengenai warga belajar dari luar daerah, pihak pengelola tidak memperlakukan hal itu terhadap lokasi sebab warga belajar dari luar daerah seperti Wonogiri atau Wonosobo dan lainnya rata-rata memiliki kerabat di sekitar lokasi pembelajaran dan berdomisili sementara di tempat kerabat tersebut.

### **Sumber Dana Pendidikan Kesetaraan**

Sumber dana di lembaga ini terbagi menjadi dua fase. Fase pertama sebelum vakum (sebelum tahun 2012) sumber dana awal berasal dari dana pendiri lembaga kemudian dibantu dana dari donatur yang tidak mengikat, dan dana hibah pemerintah melalui Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Fase kedua adalah kondisi setelah PKBM vakum merubah sumber dana menjadi donatur yang tidak mengikat dan iuran warga belajar. Iuran warga belajar diadakan mulai tahun ajaran 2013/2014 hingga sekarang. Jumlah iuran per bulan yakni dua puluh ribu rupiah. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan alokasi anggaran dana lembaga.

### **(Pelaksanaan)**

#### **Pemenuhan Tugas dan Kebutuhan Warga Belajar**

Kebutuhan awal warga belajar setelah penerimaan dan seleksi adalah penempatan atau pembagian rombongan belajar. Pembagian

Rombongan Belajar (Rombel) di PKBM Rangsang Imo Joyo tidak memperhatikan usia maupun jenis kelamin melainkan berdasar pada ijazah terakhir atau raport terakhir dari warga belajar. Jumlah warga belajar yang terdaftar di Paket B saat ini adalah enam orang dan di Paket C adalah delapan orang. Total warga belajar yang terdaftar pada tahun ajaran 2015/2016 seluruhnya empat belas orang.

Kebutuhan warga belajar dipenuhi oleh lembaga penyelenggara program Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo dengan menyediakan materi sesuai ketentuan dan diajarkan langsung oleh tutor yang berkompeten di bidangnya. Warga belajar juga disediakan tempat belajar yang nyaman sehingga dapat menempuh program paket dari awal hingga akhir. Segala urusan mengenai administrasi dan kebutuhan warga belajar dari awal hingga lulus sudah disiapkan oleh pihak pengelola maupun tutor. Tahap awal warga belajar adalah perekrutan dan tahap akhir warga belajar adalah evaluasi belajar berupa Ujian Kenaikan Kelas (UKK) atau Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

Pemenuhan kewajiban warga belajar kurang maksimal. Dari empat belas orang jumlah warga belajar yang terdaftar di Paket B dan C Pendidikan Kesetaraan PKBM Rangsang Imo Joyo, hanya sekitar lima orang yang terlihat aktif. Sembilan warga belajar hanya terlihat di awal kemudian muncul kembali pada saat ada ujian. Kedisiplinan warga belajar dalam kehadiran di setiap pembelajaran dipengaruhi oleh cuaca, dukungan keluarga, dan kemauan (motivasi) pribadi. Warga belajar yang jarang hadir harus mempertanggungjawabkan ketertinggalan materi

pelajaran melalui sistem belajar mandiri sebab PKBM Rangsang Imo Joyo tidak lagi melakukan pengulangan materi untuk beberapa kali.

### **Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola**

Kualifikasi akademik bagi Pengelola program kesetaraan adalah Lulusan MA/SMK/MA/Paket C dan telah memperoleh sertifikat pelatihan sebagai pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dilakukan oleh Jurusan PLS terakreditasi minimal B, atau PPPNFI atau BPPNFI, (Permendiknas No. 44 Tahun 2009). Mengenai latarbelakang ijazah, pengelola di PKBM Rangsang Imo Joyo sudah mengikuti paparan di atas sebab mayoritas pengelola berpendidikan S1. Mengenai sertifikat, belum ada bentuk sertifikat pelatihan khusus pengelola, yang ada yaitu dokumentasi SK (surat keterangan) pengelola yang tertera di akta notaris lembaga.

Jumlah pengelola inti untuk Program Kesetaraan Paket B dan C adalah tujuh orang. Empat diantara pengelola berjenis kelamin Perempuan dan tiga orang berjenis kelamin Laki-laki. Dua orang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lima yang lainnya Non-PNS. Empat orang sudah memiliki latar belakang minimal S1 dan tiga lainnya masih di bawah jenjang tersebut. Adapun latar belakang yang menyangkut Kependidikan ada dua orang dan lainnya berasal dari bidang Non-Kependidikan. Selain pengelola inti, PKBM rangsnag Imo Joyo juga memiliki petugas piket sebanyak tiga orang yang dibagi untuk tugas di hari Senin, Rabu, dan Jum'at sesuai jadwal pembelajaran pendidikan



kesetaraan. Tugas petugas piket adalah menjaga absensi warga belajar serta memastikan jumlah tutor yang hadir pada hari tersebut dan bila tidak seluruhnya hadir, maka akan dikonfirmasi kemudian dikomunikasikan.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pengelola di PKBM Rangsang Imo Joyo belum ada secara rinci dan jelas sehingga pelaksanaan tugas masing-masing pengelola juga belum optimal. Pihak pengelola menyatakan bahwa pengelola bekerja saat ada pekerjaan tertentu dan tidak memiliki beban kerja harian. Hal tersebut karena kesibukan pihak terkait selain di lembaga PKBM Rangsang Imo Joyo, misalnya sebagai Guru di sekolah formal. Akibatnya, terjadi kesenjangan pembagian tugas dimana tugas sering menumpuk di satu pihak saja. Penumpukan tugas di satu pihak membuat pengelolaan juga berjalan kurang sistematis

### **Kualifikasi serta Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tutor**

Pada tahun ajaran 2015/2016, jumlah tutor yang terdaftar di PKBM Rangsang Imo Joyo adalah empat belas (14) orang. Setiap tutor rata-rata mengajar minimal dua kali seminggu. Mayoritas tutor Paket B dan C berpendidikan minimal S1 dan hanya ada satu tutor yang belum memenuhi. Beliau sedang menempuh pendidikan untuk menyelesaikan gelar Strata-1, dan secara tidak langsung pendidikan terakhirnya adalah SMA. Tutor tersebut merupakan tutor baru yang mengisi kekosongan pengampu mata pelajaran PKn. Bila dilihat lebih lanjut, latar belakang pendidikan tutor mayoritas sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Walaupun

konsentrasi pendidikan tutor kebanyakan sudah sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, namun tidak kesemuanya berasal dari jurusan pendidikan. Beberapa tutor adalah lulusan non kependidikan sehingga ilmu yang didapat adalah ilmu murni dan pihak tersebut tidak memperoleh ilmu untuk mengajar.

Kualifikasi Akademik tutor pendidikan kesetaraan tidak jauh dari syarat untuk menjadi tutor. Tutor paling kurang memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sebagai berikut (Draf SNPPNF Pasal 22 ayat (1)): (a) Ijazah sarjana strata satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV) pendidikan bidang studi atau sarjana bidang studi yang telah memiliki akta IV yang diperoleh dari program studi terakreditasi untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan, atau bukti lain bahwa yang bersangkutan mampu melakukan tugas sebagai pendidik suatu mata ajar yang diampu, (b) Ijazah serendah-rendahnya Pendidikan Menengah untuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B.

Berdasar peraturan tersebut, tutor di lembaga ini mengikuti kualifikasi akademik karena mayoritas sudah memiliki latar belakang pendidikan S1 dan satu tutor yang belum lulus S1 diperbolehkan mengajar untuk Paket B menurut paparan ayat (2) di atas.

Proses pembuatan RPP dan silabus juga menjadi salah satu tanggungjawab tutor, namun pelaksanaannya tidak optimal. Tutor tidak membuat RPP atau silabus sebagai persiapan bahan ajar. Materi disesuaikan dengan sekolah formal. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) tentang tugas

Tutor dan Nara Sumber Teknis program paket B dan C selama pelaksanaan program di poin pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/pelatihan (RPP). Pengelola kurang menekankan hal ini karena kelembagaan tidak tersistem secara disiplin administrasi. Dampaknya yaitu kurang terkontrolnya perkembangan pembelajaran dan perkembangan warga belajar oleh pihak pengelola. Secara tersirat dampak yang terjadi adalah seperti itu, namun bila kembali melihat pada situasi *double job* yang ada di lembaga ini, pihak tutor merupakan pihak pengelola sehingga perkembangan dipantau lewat *double job* ini.

Selain itu, ada sedikit pergeseran antara data tutor dan data mata pelajaran di mana jumlah tutor tidak sesuai dengan jumlah mata pelajaran, dan hal ini mengharuskan adanya tutor yang mengampu dua mata pelajaran. Walau demikian, tutor di PKBM Rangsang Imo Joyo pada dasarnya mengajar sesuai latar belakang pendidikan masing-masing, kecuali tutor yang merangkap mengampu dua mata pelajaran. Ada pergeseran konsentrasi mata pelajaran oleh tutor tersebut namun masih menjadi satu rumpun materi yang terpadu misalnya mengajar Sejarah dan Sosiologi yang menjadi Terpadu di Mata Pelajaran IPS.

### **Proses Pembelajaran Akademik dan Pemanfaatan Sarana Prasarana**

Pembelajaran di PKBM Rangsang Imo Joyo diadakan tiga kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, dan Jum'at. Hal ini berdasar pada peraturan Ditjen PAUD-DIKMAS (2015.a.b) mengenai pembelajaran akademik pendidikan kesetaraan yang dilakukan sesuai

ketentuan standar isi dan standar proses, yaitu 1) pembelajaran dilakukan minimal 2 hari dalam seminggu @3 jam pelajaran, atau 3 hari dalam seminggu @2 jam pelajaran, 2) pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, tutorial, dan/atau mandiri

Berdasar analisa jadwal pelajaran, diketahui bahwa pembelajaran Paket B dimulai pukul 13.30-17.45 WIB dengan durasi satu mata pelajaran (SKK) adalah 45 menit dan istirahat 15 menit. Satu kali pertemuan berisi 2 mata pelajaran atau 4 SKK sehingga total waktu pembelajaran adalah 180 menit atau 3 jam. Pembelajaran sudah menganut sistem KTSP dimana pelajaran terpadu berlaku untuk IPA dan IPS. Mata pelajaran lainnya adalah Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PKn.

Serupa dengan jadwal pelajaran Paket B, sistem pembelajaran Paket C menunjukkan bahwa satu SKK dilakukan selama 45 menit. Satu kali pertemuan berisi 2 sampai 4 mata pelajaran dengan total 4 SKK sehingga total waktu pembelajaran Paket C juga 180 menit atau 3 jam. Beban belajar kelas X, XI, dan XII adalah sama besar, hanya saja jumlah mata pelajaran kelas X (sepuluh) lebih besar yaitu 11 macam dibandingkan dengan beban mata pelajaran kelas XI dan XII yang fokus terhadap SKL yaitu 8 macam. Paparan mengenai Paket B dan C tersebut mencakup seluruh kegiatan tatap muka di kelas, namun PKBM juga memiliki jadwal pembelajaran mandiri dan tutorial yang berisi Pendidikan Agama di hari Kamis dan Penjaskes di hari Minggu. Masing-masing waktu pelaksanaannya adalah 2 (dua) jam.

Fleksibilitas pembelajaran mengenai jam dan mata pelajaran yang dipelajari di hari tersebut sangat bergantung kondisi warga belajar dan tutor. Sebelumnya telah disampaikan bahwa warga belajar kurang rajin untuk hadir dalam pembelajaran dan kehadiran tutor juga tidak selalu tepat waktu dan tepat jadwal sehingga harus ada penyesuaian oleh semua pihak dan semua hal termasuk pembelajaran.

Pembelajaran di PKBM Rangsang Imo Joyo tidak selalu menggunakan RPP dan silabus sehingga materi yang diberikan fleksibel. Walau demikian, pembelajaran mengacu pada kurikulum KTSP dan SKL seperti penjelasan dari pengelola. Pada dasarnya materi pembelajaran pendidikan kesetaraan mengacu kepada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dalam Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jenis sarpras di PKBM Rangsang Imo Joyo dilihat dari segi data yaitu berupa RPP, silabus serta susunan materi pelajaran. Selain itu, ada pula sarpras dari segi bentuk barang yang menyangkut gedung pembelajaran, ruang kelas dan perangkat pendukung penyampaian materi pelajaran seperti meja, kursi dan papan tulis. Fasilitas yang ada di lembaga ini mayoritas tergolong dalam sarana pendidikan. Adapaun prasarana yang digunakan oleh lembaga berupa lobby sebagai lokasi penjaga piket mengontrol absensi, serta ada tempat parkir bagi warga belajar, tutor, serta pengelola. Walaupun tidak masuk langsung dalam proses pembelajaran, namun hal ini juga mendukung pelaksanaan proses pembelajaran tersebut.

Sarana prasarana yang ada di PKBM Rangsang Imo Joyo mayoritas adalah hasil pinjam-meminjam dengan SMK Pembangunan Yogyakarta. maka dari itu, dalam pengelolaan lembaga tidak ada proses pengadaan fasilitas secara keseluruhan. Fasilitas yang direncanakan dan diadakan oleh pihak lembaga hanya berupa kebutuhan operasional saat penyampaian materi seperti spidol dan penghapus, selebihnya adalah wewenang SMK Pembangunan Yogyakarta. PKBM hanya mengkondisikan sarana prasarana yang sudah tersedia agar sesuai dengan kebutuhan Paket B dan C PKBM Rangsang Imo Joyo.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pembelajaran sering dilakukan dalam satu ruang kelas dengan dibagi menjadi kelompok kecil sesuai tingkatan kelas masing-masing warga belajar. Sistem yang digunakan adalah tutor mengajar secara bergiliran pada tingkatan kelas satu dan lainnya saat jadwal harus disesuaikan dengan tutor yang hadir. Sistem ini merupakan strategi mengajar dari tutor dan pengelola namun tetap mengutamakan adanya suasana belajar yang kondusif.

### **Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan**

Langkah awal pengelolaan anggaran biaya pendidikan mencakup dua hal menurut Sri Minarti (2011: 229) : (a) Penyusunan anggaran pembiayaan yang dikembangkan dalam format sumber pendanaan dan pengeluaran, (b) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS).

Poin pertama mengenai sumber dana pendidikan kesetaraan, telah dibahas dalam tahap perencanaan. Poin kedua mengenai RAPBS

menjadi hal yang belum terlaksana secara optimal di PKBM Rangsang Imo Joyo. Pengelola menjelaskan bahwa lembaga tidak membuat RAPBS secara resmi dan rutin. Hanya ada perkiraan dana menurut kebutuhan sebelumnya dan bila terjadi kekurangan dana, akan dicarikan solusi saat itu juga. Gambaran ini bukan membuktikan bahwa lembaga mengabaikan segi pembiayaan pendidikan namun sistem keuangan dilaksanakan secara spontan serta berdasar pada pengalaman yang sudah pernah dilaksanakan, namun kurang terstruktur.

Alokasi anggaran dana di Pendidikan Kesetaraan PKBM Rangsang Imo Joyo fokus pada dana operasional yang dibagi menjadi dana untuk hak tutor dan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Mengenai gaji tutor, pihak PKBM tidak menyebutkan secara jelas berapa jumlahnya karena kembali pada sistem sosial lembaga yang mana semua bekerja dengan mengutamakan rasa ikhlas, begitu halnya dengan hak pengelola. Beberapa informan tidak terlalu menjelaskan secara detail karena mayoritas pengelola juga berperan sebagai tutor di Paket B dan C. Perihal lokasi (gedung) dan prasarana di dalamnya tidak mempergunakan biaya. Contoh anggaran kegiatan sehari-hari adalah untuk fotocopy materi pelajaran, pembelian spidol, penghapus, dan administrasi lembaga (absensi harian, rapot warga belajar, dan sebagainya).

Biaya investasi belum menjadi bagian dari jenis pembiayaan di PKBM Rangsang Imo Joyo karena sarana prasarana yang ada sejak dulu hingga sekarang mayoritas bukan milik lembaga ini. Sarana prasarana dibantu dengan disiapkan serta dipinjam oleh masyarakat. Adapun, untuk

dana personal yang mana berhubungan erat dengan iuran warga belajar, diadakan setelah PKBM mengalami kevakuman. Setiap warga belajar membayar dua puluh ribu rupiah setiap bulannya. Maka dari itu, dari ketiga jenis alokasi anggaran dana pendidikan kesetaraan di atas, PKBM Rangsang Imo Joyo menggunakan dua dari tiga jenis dana yang ada.

PKBM Rangsang Imo Joyo terpaksa harus menarik iuran dari warga belajar. Pelaksanaannya, berbagai sumber dana termasuk iuran warga belajar masih belum mampu memenuhi segala kebutuhan lembaga dari segi finansial. Strategi pengelola untuk menghadapi masalah ini dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu. Pengelola meminimalisir pengeluaran dana BOK sehingga sampai saat ini masih terdapat dana (kas) lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kekurangan anggaran biaya. Draft Standar Nasional Pendidikan Nonformal Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa sumber pembiayaan dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Maka dari itu, iuran warga belajar termasuk dalam sumber dana partisipasi masyarakat, sedangkan kas lembaga dari sisa sebelumnya bisa dikategorikan dalam sumber dana yayasan karena dahulu dana BOK sudah diterima dan menjadi milik lembaga sehingga tanggungjawab pengelolaannya berada di tangan pengelola. Strategi lembaga ini diperbolehkan demi keberlangsungan Paket B dan C PKBM Rangsang Imo Joyo.

### **(Evaluasi)**

#### **Evaluasi Perkembangan Warga Belajar**

Bentuk EHB di PKBM Rangsang Imo Joyo ada dengan model bersifat formatif dan ada pula model sumatif. Model formatif ditunjukkan melalui Ulangan harian (UH) dan Ulangan tengah Semester (UTS) yang tidak digunakan oleh keseluruhan tutor. Beberapa tutor memilih menggunakan UH dan UTS saat beberapa materi telah dikuasai warga belajar. Beberapa tutor lain memilih tidak menggunakan UH dan UTS melainkan menggunakan metode pembahasan soal-soal dalam penyampaian materi. Soal-soal untuk UH dan UTS dibuat mandiri oleh tutor yang bersangkutan.

Model EHB sumatif ditunjukkan melalui Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Kenaikan Kelas (UKK) yang ada dibawah binaan Dinas Pendidikan Yogyakarta. Mulai tahun ajaran saat ini, soal-soal dan waktu pelaksanaan UAS atau UKK ditentukan oleh Dinas. Jenis evaluasi belajar yang terakhir adalah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Jenis ini juga masuk dalam model evaluasi sumatif. Pada dasarnya, sistem UNPK Paket B dan C adalah sama. Pelaksanaan UNPK diatur secara nasional namun dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Mata pelajaran yang diujikan dalam UNPK sama dengan Ujian Nasional sekolah formal, bahkan Standar Kelulusan (SKL) nya pun juga sama yaitu mengacu pada SKL Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Dari paparan di atas, ada lima jenis Evaluasi Hasil Belajar (EHB) warga belajar di PKBM Rangsang Imo Joyo yaitu UH, UTS, UAS, UKK, dan UNPK. Hal tersebut mengikuti teori

Hartani (2011: 196) yang menyatakan bahwa Evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik.

### **Evaluasi Penyelenggaraan Program**

Evaluasi penyelenggaraan program merupakan sebuah kegiatan untuk mengevaluasi atau mengoreksi hal-hal yang telah terjadi atau dilakukan selama kegiatan penyelenggaraan program sedang atau telah berlangsung. (Ditjen PAUD-DIKMAS, 2015.a.b). Hasil evaluasi dapat dijadikan pedoman sebagai langkah tindak lanjut pengelola maupun tutor untuk menghadapi permasalahan atau bahkan kelebihan yang muncul dalam program.

Evaluasi program dilakukan pengelola setiap satu semester sekali, setiap akhir pembelajaran atau menjelang Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Bentuk evaluasi adalah rapat dengan pihak Pembina Lembaga (Kelurahan Patangpuluhan), Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Evaluasi Internal lembaga. Evaluasi bersama Pembina dihadiri oleh beberapa pimpinan lembaga-lembaga di bawah naungan Kelurahan Patangpuluhan. Rapat tersebut dipimpin oleh Ibu Lurah yang berisi laporan pelaksanaan dan koordinasi untuk program-program tersebut kedepannya. Pihak pembina mengatakan bahwa pembinaan memang tidak terlalu intens. Kelurahan Patangpuluhan selaku lembaga yang menaungi PKBM Rangsang Imo Joyo hanya berlaku sebagai lambang sekretariat PKBM. Walau demikian, hubungan pembina dengan pengelola lembaga secara personal masih terjaga.

Evaluasi bersama Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dilakukan satu semester sekali. Perwakilan dari PKBM Rangsang Imo Joyo adalah Ketua Lembaga yaitu Bapak Supatmo Priyo yang menghadiri pertemuan di Dinas. Pertemuan itu dihadiri oleh para pimpinan lembaga penyelenggara nonformal se-kota Yogyakarta. Isi dari pertemuan tersebut adalah pembahasan pelaksanaan penyelenggaraan lembaga secara umum dan pemberian informasi sekaligus petunjuk untuk pelaksanaan semester selanjutnya. PKBM Rangsang Imo Joyo sendiri tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan karena saat ini tidak mendapat dana BOK.

Secara internal, bentuk evaluasi lembaga dilakukan secara fleksibel dimana solusi dicari saat ada permasalahan dan rapat tidak berjalan rutin, hanya koordinasi dilakukan melalui komunikasi spontan saat bertemu satu sama lain atau melalui media elektronik.

Jenis-jenis evaluasi di atas termasuk dalam salah satu bagian monitoring. Monitoring dan supervisi menjadi reka evaluasi dalam pengawasan program kesetaraan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 pengawasan proses pembelajaran meliputi kegiatan pemantauan, supervisi dan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan supervisi menurut Ditjen PAUD-DIKMAS, (2015.a.b: 24), adalah: 1) kredibilitas lembaga penyelenggara, 2) kesesuaian warga belajar, 3) materi pembelajaran/pelatihan, 4) jadwal kegiatan dan alokasi waktu, 5) kompetensi tutor atau

narasumber teknis, 6) proses pembelajaran atau pelatihan, 7) tingkat kehadiran warga belajar, 8) penggunaan dana bantuan, dan 9) dokumen penyelenggaraan program.

Maka dari itu, evaluasi program Paket B dan C di PKBM Rangsang Imo Joyo mengikuti syarat monitoring yang mana evaluasi dilakukan mencakup perkembangan dalam pembelajaran maupun penyelenggaraan program.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Perencanaan pengelolaan Paket B dan C meliputi: a) penerimaan warga belajar baru dilakukan tiap awal tahun ajaran baru dan bersifat terbuka tanpa seleksi; b) perekrutan tutor dilakukan secara tertutup dengan syarat utamanya adalah kemauan dan kesehatan psikologis, lembaga belum memiliki narasumber teknis sebab belum ada kegiatan pelatihan keterampilan; c) kurikulum yang digunakan adalah KTSP dengan struktur mata pelajaran terpadu pada Paket B dan penjurusan pada Paket C, fleksibilitas pada durasi SKK untuk kedua Paket; d) saat ini, tempat pembelajaran di SMK Pembangunan Yogyakarta; e) sebelum vakum di tahun 2012, sumber dana awal berasal dari dana pendiri lembaga dan dana hibah pemerintah melalui BOK. Setelah vakum, sumber dana berasal dari iuran warga belajar dan kas lembaga.

Di luar itu, donatur yang tidak mengikat menjadi sumber dana sebelum maupun setelah vakum.

Pelaksanaan pengelolaan Paket B dan C meliputi: a) pembagian rombel berdasar pada ijazah atau raport terakhir dari warga belajar; b) enam dari tujuh pengelola memenuhi kualifikasi yaitu pendidikan minimal SMA/SMK sederajat dan mengikuti pelatihan dari lembaga PLS terakreditasi minimal B, namun beberapa tugas menumpuk di pihak tertentu saja; c) tiga belas dari empat belas tutor memenuhi kualifikasi yaitu berpendidikan minimal S1 dan konsentrasi pendidikan tutor sesuai dengan mata pelajaran yang diampu walaupun tidak kesemuanya berasal dari keguruan, kehadiran tutor sering tidak tepat waktu dan jadwal mengajar kadang meleset dari jadwal pelajaran; d) pembelajaran diadakan tiga kali dalam satu minggu tetapi jadwal pelajaran yang tertulis berbeda dengan pelaksanaan di lapangan dan pembelajaran tidak selalu menggunakan RPP-silabus; e) peminjaman sarpras tidak dipungut biaya, sistem pembelajaran dilaksanakan dengan pemberian materi dalam kelas rangkap dengan dibagi menjadi kelompok kecil; f) lembaga tidak membuat RAPBS secara resmi dan rutin, alokasi anggaran dana untuk insentif tutor dan kegiatan pembelajaran sehari-hari, namun dalam pelaksanaannya berbagai sumber dana belum mampu memenuhi segala kebutuhan lembaga dari segi finansial.

Evaluasi dibagi menjadi dua yaitu : (a) Evaluasi Hasil Belajar, model formatif ditunjukkan melalui Ulangan harian (UH) dan Ulangan tengah Semester (UTS) yang tidak digunakan oleh keseluruhan tutor. Soal-soal untuk UH dan UTS dibuat mandiri oleh tutor yang

bersangkutan. Model EHB sumatif ditunjukkan melalui Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Kenaikan Kelas (UKK) yang ada dibawah binaan Dinas Pendidikan Yogyakarta. Jenis evaluasi belajar yang terakhir adalah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Jenis ini juga masuk dalam model evaluasi sumatif. Pada dasarnya, sistem UNPK Paket B dan C adalah sama. Mata pelajaran dalam UNPK sama dengan Ujian Nasional sekolah formal, bahkan Standar Kelulusan pun sama. (b) Evaluasi penyelenggaraan program dilakukan pengelola setiap satu semester sekali, setiap akhir pembelajaran atau menjelang EHB. Bentuk evaluasi adalah rapat dengan pihak Pembina Lembaga (Kelurahan Patangpuluhan), Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan Evaluasi Internal lembaga.

### **Saran**

Lembaga sebaiknya membuat job description untuk pengelola karena bertambahnya jumlah pengelola saat ini kurang mengoptimalkan pengelolaan lembaga mengingat masih ada penumpukan tugas di beberapa pihak tertentu.

Bila kondisi saat ini tidak memungkinkan lembaga untuk meminta dana bantuan dari pemerintah, maka lembaga seharusnya lebih proaktif dalam penyusunan dan penyebaran proposal untuk memperoleh dana dari beberapa lembaga swasta di sekitar Kota Yogyakarta.

Pengelola dan tutor lebih melakukan pendekatan kepada warga belajar agar motivasi untuk mengikuti pembelajaran semakin tinggi sehingga jumlah warga belajar yang terhitung

aktif sama dengan jumlah warga belajar yang terdaftar dari awal program.

Sri Minarti. (2011). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

## DAFTAR PUSTAKA

Draft Standar Nasional Program Pendidikan Nonformal (SNPPNF). (2013). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Ditjen PAUD-DIKMAS. (2015).a. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan*. Jakarta : Kemdikbud, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

---

\_\_\_\_\_. (2015).b. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan*. Jakarta : Kemdikbud, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengawasan Proses Pembelajaran.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2006). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sujarwo. (2013). *Pembelajaran Orang Dewasa (Metode dan Teknik)*. Yogyakarta: CV. Venus Gold Press.

Siburian, Tiur Asi. (2013). *Metodologi Penelitian Manajemen Pendidikan*. Medan: Universitas Negeri Medan.

S. Nasution. (1996). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.